

APLIKASI KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP) DI MADRASAH ALIYAH KECAMATAN MEDAN SUNGGAL

Haidar Putra Daulay*, Siti Halimah, Anwar Sadad*****

*Prof.Dr., MA Pembimbing I Tesis Guru Besar Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Dr., M.Pd Pembimbing II Tesis Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

***Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Kosentrasi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstrak: This study aims to determine the knowledge and understanding of teachers on the Curriculum Level of Education Unit, the implementation of Education Unit Level Curriculum in the learning program, the implementation of the learning evaluation of Education Unit Level Curriculum, the constraints faced by teachers in the implementation of Education Unit Level Curriculum, and efforts to overcome the obstacles of curriculum implementation Level of Education Unit on learning in Madrasah Aliyah Medan Sunggal District. This research uses qualitative research methods in order to reveal in depth data and facts about the application. Education Unit Level Curriculum (KTSP) in Madrasah Aliyah Medan Sunggal District. Data collection techniques used observation, interview, documentation study. Data analysis technique used is to process and analyze research data using qualitative research procedure, that is by explaining or explaining result of this research as it is and draw conclusion by using deductive method.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman guru tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dalam program pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, kendala yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, dan upaya mengatasi kendala pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada pembelajaran di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam rangka mengungkapkan secara mendalam data dan fakta tentang aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah mengolah dan menganalisa data penelitian menggunakan prosedur penelitian kualitatif, yakni dengan menjelaskan atau memaparkan hasil penelitian ini apa adanya serta menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Kata Kunci : *Aplikasi, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*

Pendahuluan

Dalam dunia pendidikan, salah satu kunci untuk menentukan kualitas lulusan terletak pada kurikulum pendidikan yang diterapkan. Karena pentingnya maka setiap kurun waktu tertentu kurikulum selalu dievaluasi untuk kemudian disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi serta kebutuhan pasar. Hamzah mengemukakan bahwa pendidikan saat ini harus mampu mengenali siapa pelanggannya, dan dari pengenalan ini pendidikan memahami apa aspirasi dan kebutuhannya (*need assessment*). Setelah mengetahui aspirasi dan kebutuhan mereka, baru ditentukan sistem pendidikannya, dan bentuk kurikulumnya, dan persyaratan pengajarnya.¹

Penyelenggaraan pendidikan pada suatu lembaga pendidikan harus mengikuti perkembangan kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga tidak heran bila prioritas kebijakan nasional selalu ikut berubah. Begitu pun pola pembiayaan pendidikan serta kondisi sosial, termasuk perubahan pada tuntutan profesi serta kebutuhan dan keinginan pelanggan. Semua itu ikut memberikan dorongan bagi penyelenggara pendidikan untuk selalu melakukan proses perbaikan, modifikasi, dan evaluasi pada kurikulum yang digunakan.

Di dalam proses pengendalian mutu, kurikulum merupakan perangkat yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menjamin kompetensi keluaran dari proses pendidikan. Kurikulum harus selalu diubah secara periodik untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan pengguna dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

Dalam perjalanan sejarah, pendidikan Indonesia telah menerapkan paling sedikit enam kurikulum, yaitu kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (meski belum sempat disahkan oleh pemerintah, tetapi sempat berlaku di beberapa sekolah *piloting project*), dan terakhir Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang dikeluarkan pemerintah melalui Permen Diknas Nomor 22 tentang Standar Isi, Permen Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen Nomor 24 tentang Pelaksanaan kedua Permen tersebut.² Dan sebelum diterapkannya kurikulum 1968, sebenarnya pada tahun 1947 telah dimulai penerapan kurikulum yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Lahirnya kurikulum Rencana Pelajaran 1947 diawali dari pembenahan sistem persekolah pasca Indonesia merdeka yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, akan tetapi pembenahan ini baru bisa diterapkan pada tahun 1965 melalui keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila.

KTSP sendiri merupakan revisi dan pengembangan dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). KTSP lahir karena dianggap KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indikator, silabus, dan beberapa komponen kurikulum lainnya.³ Untuk menyikapi pergantian kurikulum secara nasional, yang harus diperhatikan adalah kesiapan lembaga pendidikan dalam mengelola Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara tepat dan efisien sehingga proses belajar mengajar di sekolah bisa efektif, produktif, dan berprestasi.

Setiap lembaga pendidikan dituntut supaya mampu mengembangkan strategi dan menentukan prioritas pembelajaran serta dapat mengendalikan pemberdayaan berbagai potensi sekolah

dan lingkungan sekitarnya dengan baik sesuai dengan yang diamanatkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ini.

Kurikulum formal dan tertulis merupakan ciri utama pendidikan disekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum merupakan syarat mutlak bagi pendidikan disekolah serta bagian yang tidak terpisahkan dari sekolah.⁴ Keberadaan kurikulum menempati posisi yang sangat penting karena akan menentukan hasil yang sangat diharapkan. Karena posisinya tersebut, maka kurikulum disusun secara sistematis sebagai program pendidikan bagi siswa. Untuk mencapai hasil yang diharapkan, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak yang terkait terlebih bagi guru itu sendiri yang merupakan ujung tombak dari pendidikan.

Pengelolaan pendidikan yang bersifat sentralistik menuju desentralistik, memberikan dampak pada perubahan kurikulum di Indonesia. Sebelum reformasi bergulir pada tahun 1998, kurikulum yang dipakai di Indonesia yaitu bersifat sentralistik yaitu kewenangan pengelolaan pendidikan berada dipusat. Baru setelah reformasi, tuntutan untuk mengadakan perubahan diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan mulai muncul kepermukaan yang nantinya akan melahirkan pengelolaan pendidikan yang bersifat desentralistik yaitu kewenangan pengelolaan pendidikan berada di pemerintah daerah kota atau kabupaten. Lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom serta lahirnya Tap MPR No. IV/MPR/1999 tentang Arah Kebijakan Pendidikan di Masa Depan⁵, menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat dalam dimensi perubahan global.⁶

Globalisasi dan segala hal yang terkait dengan harus direspons dengan matang, terutama melalui pendidikan. Persaingan bebas dan tuntutan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi serta kemampuan lainnya akan sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Salah satu upaya memberikan bekal dalam menghadapi globalisasi tersebut adalah pendidikan. Peran pendidikan dalam masyarakat senantiasa mengalami pergeseran, sesuai dengan situasi dan kondisi.⁷ Oleh karenanya diperlukan kurikulum yang mampu menciptakan generasi yang mandiri, kritis, rasional, cerdas, kreatif, serta memiliki kesabaran yang mampu bersaing, siap menghadapi berbagai tantangan.⁸ Sejalan dengan semangat reformasi 1998 dan munculnya tuntutan perubahan, maka pada tahun 2001 digulirkan otonomi daerah sekaligus pendidikan juga diotonomikan. Otonomi pendidikan sendiri diartikan sebagai proses pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan dan (wewenang) dari pimpinan atau atasan ke tingkat bawahan dalam organisasi.

Dengan adanya otonomi pendidikan pemerintah daerah kabupaten kota mempunyai kewenangan luas dan mendalam serta memikul tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan.⁹ Sebagai tindak lanjut dari otonomi pendidikan tersebut, maka pada tahun 2004 muncullah kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yaitu perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar dan pemberdayaan sumber daya pendidikan.¹⁰ Namun kurikulum ini hanya berjalan selama dua tahun. Pada tahun 2006, KBK disempurnakan lagi dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dengan adanya penyempurnaan KBK menjadi KTSP, maka peluang dari masing-masing sekolah akan semakin besar memberdayakan daerah dan sekolahnya. Pemberdayaan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta penilaian pembelajaran sesuai dengan kondisi dan aspirasi mereka.

Meski akan menghasilkan hasil yang berbeda dari masing-masing sekolah karena kondisi daerahnya yang berbeda, namun ada bagian yang sama seperti pada prinsip pengelolaan kurikulum berbasis sekolah (KBS) yaitu "kesatuan dalam kebijaksanaan dan keberagaman dalam pelaksanaan" maksud dari kesatuan dalam kebijaksanaan adalah sekolah menggunakan perangkat dokumen KBK yang sama sama dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional yang sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional. Sedangkan keberagaman dalam pelaksanaan artinya keberagaman silabus yang akan dikembangkan oleh sekolah masing-masing sesuai dengan karakteristik sekolahnya.

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di tingkat satuan pendidikan pada tahun 2009 lalu, diperoleh informasi yang berkaitan dengan pengembangan KTSP antara lain : 1) masih ada satuan pendidikan yang belum membentuk Tim Pengembangan Kurikulum, 2) pada umumnya satuan pendidikan sudah mengembangkan KTSP tetapi belum didahului dengan melakukan analisis konteks, khususnya analisis SNP dan tata cara melakukan analisis SNP, 3) Peran komite sekolah/madrasah dalam pengembangan KTSP belum optimal, 4) sistematika KTSP beberapa satuan pendidikan beraneka ragam dan belum sesuai dengan panduan, 5) masih terdapat sekolah yang melakukan penyempurnaan KTSP hanya dengan meng-copy KTSP tahun sebelumnya, mengganti tanggal, dan memperbaharui tanda tangan, tanpa melalui proses evaluasi keterlaksanaan KTSP, 6) masih ada sekolah/madrasah yang tidak melakukan validasi dan pengesahan dokumen KTSP setiap tahun, 7) banyak guru yang masih mengadopsi silabus dari contoh atau model silabus yang diterbitkan Direktorat pendidikan tingkat menengah dan dasar atau silabus sekolah lain, 8) banyak guru yang belum melakukan pemetaan SK dan KD sebagai acuan dalam pengembangan silabus, keadaan yang sama ditemukan pada lingkungan madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah, maupun aliyah. Salah satu penyebab keadaan ini adalah ketiadaan petunjuk teknis dan contoh memadai dilapangan.¹¹

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap guru-guru di Madrasah Aliyah Se Kecamatan Medan Sunggal, menginformasikan bahwa adanya perubahan pada kurikulum tidak dipersiapkan dengan matang memberi dampak pada guru, antara lain guru masih kurang mampu dalam memahami dan menerapkan kurikulum tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan dan pelatihan yang diberikan, pelaksanaan pembelajaran masih terkesan lamban.

Pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru masih kurang mampu berperan aktif dalam upaya pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kurangnya pemahaman terhadap tatacara pelaksanaan kurikulum sehingga menyebabkan pelaksanaan tugas guru berjalan dengan apa adanya tanpa munculnya upaya untuk lebih mengefektifkan aplikasi kurikulum terutama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dalam kegiatan pembelajaran.

Kajian Teori

1. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

a. Pengertian Kurikulum dan KTSP

Istilah kurikulum pertama kali muncul dalam kamus Webster pada tahun 1856. Kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni kata *curre*. *Curre* adalah kata kerja yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, dan menjalani. Dari kata kerja *curre* dijadikan kata benda menjadi curriculum yang berarti tempat berlari atau tempat perlombaan atau balapan atau lapangan perlombaan (*a place for running*), jarak yang harus ditempuh dalam perlombaan atau balapan (*a race course*), dan kereta pacu yang membawa seseorang dari *start* ke *finish* (*chariot*). Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa pada awalnya istilah kurikulum dipakai bukanlah istilah di bidang pendidikan tetapi istilah di bidang olahraga atau atletik.¹²

Beberapa ahli juga mengemukakan definisi kurikulum, seperti Lenggulung menegaskan bahwa perkataan kurikulum telah dikenal dalam dunia pendidikan, sebagai sebuah istilah yang tidak asing lagi. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu *curir* yang artinya pelari dan *curere* yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah, kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai garis *finish*.¹³

Kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional, materi yang perlu dipelajari dan pengalaman belajar yang harus dijalani untuk mencapai kemampuan tersebut, dan evaluasi yang perlu dilakukan untuk menentukan tingkat pencapaian kemampuan peserta didik, serta seperangkat peraturan yang berkenaan dengan pengalaman belajar peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya pada satuan pendidikan tertentu.¹⁴

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan perangkat mata pelajaran ini disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut serta kebutuhan lapangan kerja.

Lama waktu dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang dilaksanakan. Kurikulum ini dimaksudkan untuk dapat mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran secara menyeluruh.

Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu berdiri sendiri. Untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan berbagai hal, seperti: konsep, prinsip, kreativitas, tanggung jawab, dan keterampilan. Dengan kata lain perlu mengalami perkembangan dalam aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Demikian pula individu juga makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sesamanya.¹⁵

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.¹⁶ Menurut Mulyasa menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran yakni sekolah dan satuan pendidikan.¹⁷

b. Landasan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dilandasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam BNSP 2006 berikut :¹⁸

- a) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
- c) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006

c. Peran dan Fungsi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan bagian utama dari pendidikan formal yang syarat mutlak nya adalah adanya kurikulum sebagai pedoman. Dengan demikian guru dalam merancang program pembelajaran maupun melaksanakan proses pembelajaran akan selalu berpedoman pada kurikulum.¹⁹

Kurikulum tentu harus memiliki peran dalam upaya mewujudkan sasaran dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Sanjaya peran kurikulum itu meliputi :

1) Peran Konservatif

Salah satu tugas dan tanggung jawab lembaga pendidikan adalah sebagai suatu lembaga pendidikan yang berfungsi untuk mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat kepada generasi muda yaitu siswa. Peran konservatif kurikulum adalah melestarikan nilai-nilai budaya sebagai warisan masa lalu.

2) Peran Kreatif

Kurikulum harus mampu menjawab tantangan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang cepat berubah. Kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa untuk dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya.

3) Peran Kritis dan Evaluatif

Kurikulum berperan dalam menyeleksi nilai dan busaya mana yang perlu dipertahankan dan nilai atau budaya baru mana yang harus dimiliki oleh anak didik.²⁰

Berdasarkan uraian pendapat di atas dapat dipahami bahwa kurikulum memiliki peran penting terhadap perkembangan pendidikan. Ketiga peran di atas harus dapat dinyatakan seimbang berjalan secara seimbang, terjalin keharmonisan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kurikulum dapat memenuhi tuntutan waktu dan keadaan dalam membawa siswa menuju kebudayaan masa depan yang lebih baik.

d. Tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Secara khusus tujuan diterapkannya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah :

- a). Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.
- b). Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama.
- c). Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai.²¹

Sedangkan menurut Baedhowi menyatakan bahwa tujuan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah untuk mewujudkan kurikulum yang sesuai dengan kekhasan (karakteristik), kondisi, potensi daerah, kebutuhan dan permasalahan daerah, satuan pendidikan dan peserta didik dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional.²²

e. Karakteristik Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan

Selanjutnya karakteristik di atas dapat diuraikan agar lebih mampu untuk dipahami yaitu:

- a). Pemberian Otonomi Luas Kepada Sekolah dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) memberikan otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat.
- b). Partisipasi Masyarakat dan Orang Tua yang Tinggi
Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), pelaksanaan kurikulum didukung oleh partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi.
- c). Kepemimpinan yang Demokratis dan Profesional
Dalam KTSP, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum didukung oleh adanya kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional.
- d). Tim Kerja yang Kompak dan Transparan

Dalam KTSP, keberhasilan pengembangan kurikulum dan pembelajaran didukung oleh kinerja team yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan

Peran Guru dalam Melaksanakan KTSP

Guru adalah sebuah istilah dalam bahasa Sanskerta yang berarti pengajar. Guru adalah orang yang pekerjaannya, mata pencahariannya, atau profesinya mengajar. Dimana mengajar itu sendiri adalah memberi pelajaran. Sedangkan guru dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa: Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah".²³

Dari defenisi di atas, dapat diketahui bahwa guru disebut juga sebagai pendidik. Pendidik dalam arti yang umum adalah orang yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran.²⁴ Namsa mendefenisikan pendidik adalah orang yang pekerjaannya mengajar, baik mengajar bidang studi

maupun mengajarkan suatu ilmu pengetahuan pada orang lain.²⁵ Selanjutnya Purwanto menyebutkan pendidik adalah seseorang yang memberikan suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau kelompok orang.²⁶

Guru juga dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan untuk kepentingan anak didik, sehingga menjunjung hubungan sebaik-baiknya dengan anak didik, mengembangkan dan menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan.²⁷ Menurut Sudirman, guru itu adalah pendidik profesional di sekolah dengan tugas utama mengajar. Dan guru bidang studi adalah guru yang khusus mengajar bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang menjadi bidang keahliannya.²⁸

Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan”.²⁹

Adapun fungsi pendidikan agama itu sendiri adalah membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan mampu menjaga kedamaian dan kerukunan hubungan inter dan antar umat beragama. Dan Tujuannya adalah untuk berkembangnya kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama yang menyerasikan penguasaannya dalam ilmu pengetahuan teknologi dan seni.³⁰

Dari beberapa konsep di atas maka dapat dilihat bahwa guru pendidikan agama Islam itu adalah orang atau pendidik yang pekerjaannya atau profesinya mengajar bidang studi atau memberikan mata pelajaran agama Islam demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa guru adalah orang yang mentransfer atau memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru adalah orang yang telah dipercaya masyarakat yang berniat dan memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pendidikan, untuk itu guru harus memperhatikan sikap, tingkah laku koprofesien dan kompetensi/kemampuannya dalam mengajar sebagai bentuk pengabdian. Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas. Dalam hal ini ada 3 jenis tugas guru seperti:

- a. Tugas guru sebagai profesi yang meliputi mendidik, mengajar dan melatih, tugas ini memerlukan keahlian khusus seorang guru.
- b. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan, dimana seorang guru harus mampu menjadi orang tua kedua bagi anak didik.
- c. Selain itu guru mempunyai kedudukan yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat dimana seorang guru di depan memberi teladan di tengah membangun dan di belakang memberi dorongan dan motivasi (*ing ngarso sung tulodo, ing madya mangon karsa, tutwuri handayani*).³¹

Rostiyah Nk, menjelaskan bahwa tugas guru itu adalah:

- a. Menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman.
- b. Membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara Pancasila.
- c. Menyiapkan anak menjadi warga negara yang baik.
- d. Sebagai perantara dalam pembelajaran.
- e. Sebagai pertimbangan untuk membina anak ke arah kedewasaan.
- f. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.
- g. Sebagai penegak disiplin.
- h. Sebagai administrator dan manajer.

- i. Guru bekerja sebagai suatu profesi.
- j. Sebagai perencana kurikulum.
- k. Sebagai pekerja yang memimpin (*guidance worker*).
- l. Sebagai sponsor dalam kegiatan anak-anak.³²

Kemudian dalam Undang-undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan pada pasal 20 juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas koprofesionalan, guru berkewajiban untuk:

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengoreksi hasil pembelajaran.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan klasifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika.
- e. Memelihara dan memupuk prestasi dan kesatuan bangsa.³³

Hal yang senada juga dijelaskan Drajat bahwa fungsi dan tugas guru itu ada tiga. Di sini penulis juga berasumsi bahwa jika dikelompokkan dari beberapa uraian di atas maka secara umum tugas guru itu meliputi:

- a. Tugas pengajaran yaitu guru sebagai pengajar.
- b. Tugas bimbingan dan penyuluhan yaitu guru sebagai pembimbing.
- c. Tugas administrasi yaitu guru sebagai pemimpin.³⁴

Menurut konsep Islam, guru tidak sekedar mengajari melainkan juga melatih, membiasakan, membimbing, memberi dorongan, mengembangkan, mengarahkan, memberi contoh dan memfasilitasi proses pembelajaran guna memberdayakan segenap potensi atau daya-daya yang dimiliki peserta didik secara maksimal.³⁵

Menurut Sadly guru Pendidikan Agama Islam mempunyai tugas dan tanggung jawab yang mulia, untuk menuntut generasi muda ke jalan Allah Swt dan membebaskan mereka dari berbagai jebakan kesatuan yang datang dari berbagai sudut, guru juga sekaligus menuntun umat agar mau dan mampu melaksanakan fungsi dan perannya sebagai hamba dan khalifah Allah Swt, karena tugas mendidik mulia, maka Allah Swt menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu lebih tinggi derajatnya dibanding manusia lainnya.³⁶

Selanjutnya juga ditegaskan melalui Q.S al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut :

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."³⁷

Dan Q.S an-Nahl ayat 43 yang berbunyi:

Artinya: Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu

*kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahu.*³⁸

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa seorang guru itu sangat dihormati dan dihargai bahkan dikagumi dan dimuliakan. Kedudukan orang yang berilmu sangatlah mulia. Untuk itu seorang guru dituntut agar tetap menjaga amanah yang diembannya agar mereka termasuk orang-orang yang mulia.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa dalam kegiatan belajar senantiasa diusahakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan perubahan terhadap tingkah laku. Dalam konsep ajaran Islam pun melakukan aktifitas belajar merupakan suatu anjuran yang harus dilakukan oleh setiap muslim, sebab menuntut ilmu dianggap suatu jihad atau perjuangan dalam menegakkan syiar agama Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Hadits Nabi Muhammad Saw. berikut ini :

*Artinya : Anas ra. berkata : Rasullah Saw. bersabda : Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berjuang fisabilillah hingga kembali. (HR. At-Tarmidzy).*³⁹

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa begitu tegas memberikan keterangan bahwa setiap orang menuntut ilmu baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat (ilmu agama) merupakan suatu perjuangan sehingga nilainya sama dengan nilai jihad fisabilillah.

Dari beberapa uraian di atas maka dapat kita ketahui bahwa tugas guru itu tidaklah mudah dan harus dituntut mempunyai keahlian khusus di dalamnya, karena guru memiliki kedudukan yang urgen dalam pendidikan yaitu sebagai tenaga profesional. Guru bukan sekedar mengajar tetapi juga sebagai direktur dalam belajar sehingga tugas dan tanggung jawabnya lebih berat seperti perencana, pengelola, penilai, motivator, dan pembimbing dalam belajar.

Guru berfungsi untuk meningkatkan martabat dan sebagai agen pembelajaran yaitu sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik dalam meningkatkan mutu pendidikan Nasional.⁴⁰

Untuk mengklasifikasikan tugas-tugasnya, maka setiap guru sangat dituntut untuk memiliki kompetensi dalam proses pembelajaran karena kompetensi merupakan kualifikasi guru yang terpenting. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan memiliki kompetensi, guru dapat mengembangkan kariernya sebagai guru yang baik dan guru juga dapat mengatasi berbagai kesulitan dalam pembelajaran, di samping itu guru juga akan mengerti dan sadar akan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik yang baik dan didambakan oleh masyarakat.

Selanjutnya peranan guru dalam pembelajaran meliputi banyak bidang. Namun disini penulis mengklasifikasikannya menurut peranan yang dianggap paling dominan, ini dijelaskan oleh Uzer Usman dalam bukunya bahwa peran guru itu meliputi:

- a. Peran guru sebagai demonstrator.
- b. Guru berperan sebagai pengelola kelas.
- c. Guru sebagai mediator dan fasilitator.
- d. Guru sebagai evaluator.⁴¹

E. Mulyasa, dalam bukunya *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Efektif dan Menyenangkan* menjelaskan bahwa peran guru itu mencakup sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu, model dan teladan pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kendali, pembawa cerita, emansivator, evaluator, pengawet dan kulminator.⁴²

Guru dan kurikulum adalah komponen penting dalam sebuah sistem pendidikan. Keberhasilan atau kegagalan dari suatu sistem pendidikan sangat dipengaruhi oleh dua faktor tersebut. Sertifikasi tenaga pendidikan dan pengembangan kurikulum yang belakangan ini tengah dilakukan adalah upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan melalui dua aspek di atas.⁴³

Dilihat dari segi pengelolaannya, pengembangan kurikulum dapat dibedakan antara yang bersifat sentralisasi, desentralisasi, dan sentraldesentral. Dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi, kurikulum disusun oleh sesuatu tim khusus di tingkat pusat. Kurikulum bersifat uniform untuk seluruh Negara, daerah, atau jenjang/jenis sekolah. Faktor-faktor yang menimbulkan suatu motivasi kerja guru dalam mengemb.angkan kurikulum di sekolah akan berdayaguna, apabila guru mempunyai keinginan, bertanggung jawab, minat, penghargaan, dan meningkatkan dirinya dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dalam upaya mengembangkan kurikulum di sekolah.

Khususnya dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru untuk mengembangkan kurikulum di sekolah, guru dituntut mengembangkan dirinya sehingga dapat memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat. Peningkatan kemampuan guru melalui pendidikan jabatan, dapat ditempuh dengan mengikuti penataran, seminar yang berkenaan dengan tugas guru di sekolah, maupun melalui pendidikan yang lebih tinggi.⁴⁴

Tujuan utama pengembangan kurikulum yang uniform ini adalah untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memberikan standar penguasaan yang sama bagi seluruh wilayah. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa kondisi. Pertama, wilayah Negara Indonesia luas sekali, terbentuk atas pulau-pulau yang satu sama lain letaknya berjauhan dan terpisah ke laut. Kedua, kondisi dan karakteristik tiap daerah berbeda-beda, ada daerah tertutup ada yang terbuka, ada daerah kaya dan daerah miskin dan sebagainya. Ketiga, perkembangan dan kemampuan sekolah juga berbeda-beda. Ada sekolah yang sudah mapan mampu berdiri sendiri dan melakukan pengembangan sendiri, karena memiliki personalia, fasilitas yang memadai, dan manajemen yang mapan. Sekolah yang lain kondisinya sangat memperhatikan, karena segalanya masih berada pada tingkat darurat. Jumlah yang demikian ini tampaknya jauh lebih banyak dibandingkan dengan sekolah mapan. Keempat, adanya golongan atau kelompok tertentu dalam masyarakat, yang ingin lebih mengutamakan golongan atau kelompoknya dan menggunakan sekolah sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Guru harus memiliki beberapa keterampilan yang membantu respon siswa tersebut diantaranya dengan cara:

- a) Bisa meningkatkan partisipasi siswa secara penuh dalam proses pembelajaran
- b) Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu sendiri pada hakikatnya bertanya.
- c) Dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menentukan siswa untuk menentukan jawaban.
- d) Memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas.⁴⁵

Model pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi mempunyai beberapa kelebihan disamping juga kelemahan. Kelebihannya selain mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, dan tercapainya standar minimal penguasaan/perkembangan anak, juga model ini mudah dikelola, dimonitor dan dievaluasi, serta lebih hemat dilihat dari segi biaya, waktu, dan fasilitas. Hal-hal di atas tampaknya sesuai dengan kondisi dan tahap perkembangan Negara kita dewasa ini.

Model pengembangan ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, menyeragamkan kondisi yang berbeda-beda keadaan dan tahap perkembangan intelek, alam dan social budayanya, sukar sekali. Penyeragaman dapat menghambat kreativitas, dapat memperlambat kemajuan sekolah yang sudah mapan dan menyeret perkembangan sekolah yang masih terbelakang. Kedua, ketidakadilan dalam menilai hasil. Ketiga, penggunaan standar yang sama untuk semua sekolah di seluruh wilayah akan memberikan gambaran hasil yang beragam dan menunjukkan adanya perbedaan yang sangat ekstrem.

Peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi

Dalam kurikulum yang bersifat sentralisasi, guru tidak mempunyai peranan dalam perancangan, dan evaluasi kurikulum bersifat makro, mereka lebih berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum makro disusun oleh tim atau komisi khusus, yang terdiri atas para ahli. Penyusunan kurikulum mikro dijabarkan dari kurikulum makro. Guru menyusun kurikulum dalam bidangnya untuk jangka waktu satu tahun, satu semester, satu caturwulan, beberapa minggu ataupun beberapa hari saja.

Peranana guru dalam kurikulum bersifat desentralisasi

Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah atau daerah. Kurikulum ini diperuntukkan bagi suatu sekolah atau lingkungan wilayah tertentu. Pengembangan kurikulum semacam ini didasarkan karakteristik, kebutubhan, perkembangan daerah serta kemampuan sekolah atau sekolah-sekolah tersebut. Dengan demikian kurikulum terutama isinya sangat beragam, tiap sekolah atau wilayah mempunyai kurikulum tersendiri, tetapi kurikulum ini cukup realistis.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang serius dalam upaya pengembangan standar kompetensi guru.

- a. Kejelasan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dari profesi guru.
- b. Permasalahan yang jelas serta tujuan yang spesifik.
- c. Antisipasi kendala.
- d. Melalui proses indentifikasi dan seleksi berbagai alternative pemecahan.
- e. Sekalipun uji coba suatu standar kopetensi dalam skala terbatas.⁴⁶

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif naturalistik, yaitu penelitian yang melaksanakan pengambilan data secara alami atau natural.⁴⁷ Pemilihan pendekatan ini dianggap relevan karena bertujuan untuk mengetahui secara lengkap bagaimana aplikasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁴⁸

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan dengan beberapa cara, antara lain:

- a) Observasi (pengamatan)
Observasi langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan. Namun dalam hal ini, observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), dimana peneliti datang di tempat kegiatan yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.
- b) Interview (wawancara)
Selain oberservasi lapangan, dalam perolehan data juga dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Adapun sumber data/informan yang akan diwawancarai adalah orang-orang yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mencakup kepala madrasah, PKM bidang kurikulum, guru, wali kelas, dan beberapa orang guru bidang studi. Wawancara ini akan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*),

yaitu melakukan wawancara yang bebas yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun lengkap dalam pengumpulan data, melainkan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dengan demikian, pertanyaan selama wawancara berlangsung dapat diperdalam secara bebas guna memperoleh data yang lebih lengkap.

c) Pengkajian Dokumen

Untuk melengkapi pengumpulan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, maka diperlukan data lain berupa dokumen-dokumen pendukung. Dalam hal ini, berbagai data dokumen yang berhubungan dengan permasalahan akan dicari atau diminta langsung kepada nara sumber. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa dokumen I KTSP berupa panduan umum pelaksanaan kurikulum, dokumen 2 yang berisi pengembangan silabus dan rencana program pembelajaran yang dibuat oleh guru Madrasah Aliyah, serta beberapa dokumen lain yang mendukung penelitian. Selain dokumen yang diminta dari pihak madrasah, peneliti juga akan membuat dokumen pribadi berupa foto-foto kegiatan yang direkam selama penelitian berlangsung.

Teknik Analisis Data

Yang dimaksud dengan teknik analisis data di sini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁴⁹ Sebenarnya melakukan analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam tiga situasi waktu, yaitu, sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam hal ini, lebih cenderung dilakukan analisis data-data yang diperoleh ketika diproses pengumpulan data di lapangan berlangsung, misalnya ketika melakukan wawancara, analisis dilakukan terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka akan dilanjutkan kepada pertanyaan lain hingga diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun secara terperinci, teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan analisis data di lapangan model Miles and Huberman, yang terdiri dari *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*.⁵⁰

Pengujian Keabsahan Data

Adapun dalam melakukan uji keabsahan data pada penelitian ini adalah dengan mengikuti panduan uji keabsahan data penelitian kualitatif yang meliputi: pengujian *kredibilitas*, pengujian *transferability*, pengujian *depenability*, dan pengujian *konfirmability*.⁵¹

1. Pengujian kredibilitas

Dalam penelitian ini, pengujian kredibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah mengunjungi kembali lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan ulang, serta mencocokkan hasil wawancara dengan informan yang pernah ditemui. Pengamatan ulang juga difokuskan pada observasi lapangan guna memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh informan benar-benar telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Madrasah Aliyah di Kecamatan Medan Sunggal, bukan hanya sebatas program kerja saja, sehingga dengan begitu diharapkan tidak ada informasi yang salah atau informasi yang disembunyikan.

Selain itu, dengan adanya pengujian ini diharapkan ada masukan baru atau informasi lain yang sebelumnya tidak tercatat atau terlewatkan oleh para informan. Pengujian kredibilitas ini dilakukan pada saat kunjungan berikutnya ke lokasi penelitian untuk melakukan pendalaman materi yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Pengujian transferability

Dalam melakukan pengujian data dalam bentuk transferability (validitas eksternal) ini, peneliti membuat laporan hasil penelitian dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat memahami hasil penelitian ini dengan baik, sehingga mereka dapat membentuk sikap apakah hasil penelitian ini dapat diaplikasikan di tempat lain atau tidak. Kegiatan utama yang dilakukan dalam pengujian transferability ini adalah dengan melakukan bimbingan rutin dengan dosen pembimbing serta selalu berpedoman dengan panduan penulisan karya ilmiah yang diterbitkan oleh PPs UIN Sumatera Utara.

3. Pengujian depenability

Untuk menghindari keraguan dari berbagai pihak tentang kebenaran pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti perlu melakukan uji *depenability* atau *reabilitas*, yaitu melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Adapun bentuknya adalah dengan membuat rekaman jejak aktivitas penelitian dalam bentuk foto, rekaman wawancara, serta meminta surat keterangan telah melakukan penelitian dari lembaga/lokasi yang telah diteliti. Seluruh data-data tersebut akan dilampirkan dalam laporan akhir penulisan tesis program pascasarjana ini.

4. Pengujian konfirmability

Adapun bentuk pengujian keabsahan data yang lain adalah dengan cara pengujian konfirmability atau disebut juga dengan uji obyektivitas penelitian. Agar hasil penelitian dapat teruji secara konfirmability serta dapat diterima dan disepakati oleh banyak orang, maka selama melaksanakan penelitian, peneliti berusaha semaksimal mungkin mengikuti prosedur ilmiah dalam penelitian kualitatif, sejak dari proses pengumpulan data sampai kepada menyajikan hasil dan laporan penelitian.

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengetahuan dan pemahaman guru terhadap KTSP di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal.

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran pada Madrasah Aliyah Swasta Medan Sunggal adalah proses kerja dalam upaya peningkatan kualitas madrasah sebagai sebuah organisasi pendidikan yang memiliki tujuan. Dalam suatu organisasi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang pasti, tentunya antara komponen dalam sistem organisasi tidak dapat dipisahkan secara terpisah-pilah. Hal itu tentunya, diperlukan suatu sistem yang saling interdependensi antara satu komponen personel dengan personel lainnya. Bertolak dari saling interdependensi maka setiap individu, masing-masing mempunyai potensi yang dapat dibangun secara kokoh. Salah satunya potensi dalam organisasi adalah adanya kelompok kerja, apakah yang bersifat hubungan sosial dalam lingkungan organisasi, maupun yang bersifat hubungan kerja.

Dengan kata lain, upaya peningkatan kualitas pendidikan pada Madrasah Aliyah Swasta Medan Sunggal berusaha secara berkelanjutan mengembangkan profesional untuk bekerjasama guna menjamin madrasah mereka berfungsi efektif dan pelajar mereka juga belajar efektif. Perlu ditegaskan bahwa keberhasilan peningkatan kualitas pada Madrasah Aliyah Swasta Medan Sunggal bergantung atas kemampuan dan keinginan para komponen madrasah untuk bekerjasama untuk menatransformasikan seluruh budaya madrasah, dari budaya lama yang kurang kondusif kepada budaya baru yang kondusif bagi efektivitas pembelajaran dan madrasah.

Kesiapan guru di lapangan akan menjadi faktor penentu implementasi kurikulum baru. Betapapun komprehensif perencanaan pemerintah (kurikulum) pada akhirnya semua akan bergantung pada mutu dan kualitas guru di lapangan. Konsep kesiapan guru sebagai kemampuan dan kemauan guru

untuk memikul tanggung jawab untuk mengarahkan perilaku mereka sendiri. Pengetahuan dan keterampilan guru terhadap kurikulum dibuktikan dengan guru harus selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kurikulum baru yang dibuat pemerintah. Dengan demikian, kompetensi dan kesiapan guru dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan pembaharuan kurikulum pendidikan di atas perlu dipertimbangkan.

2. Pelaksanaan KTSP dalam program Pembelajaran di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal

Dalam pelaksanaan peningkatan Kualitas pendidikan Kepala Madrasah ini dituntut kemampuan profesional dan manajerial dari semua komponen warga madrasah di bidang pendidikan agar semua keputusan yang dibuat madrasah didasarkan atas pertimbangan mutu pendidikan. Khususnya Kepala Madrasah harus dapat memposisikan sebagai agen perubahan di madrasah. Oleh karena itu, Kepala Madrasah harus:

- a. Memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan masyarakat sekitar Madrasah
- b. Memiliki pemahaman dan wawasan yang luas tentang teori pendidikan dan pembelajaran
- c. Memiliki kemampuan dan keterampilan untuk menganalisa situasi sekarang untuk memperkirakan kejadian di masa depan sebagai *input* penyusunan program madrasah
- d. Memiliki kemampuan dan kemauan dalam mengidentifikasi masalah dan kebutuhan yang berkaitan dengan efektifitas pendidikan di madrasah
- e. Mampu memanfaatkan berbagai peluang, menjadikan tantangan menjadi peluang, serta mengkonsepkan arah perubahan madrasah.⁵²

3. Kendala Pelaksanaan KTSP pada Pembelajaran di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal

Setyodarmodjo menjelaskan bahwa dalam suatu proses kebijakan, proses implementasi merupakan proses yang tidak hanya kompleks (*complicated*), namun juga hal yang sangat menentukan. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang sudah dirumuskan dengan sangat sempurna, namun gagal dalam implementasinya mencapai tujuan, hal ini salah satunya adalah terjadi karena dilakukan melalui cara-cara lain, tidak sesuai dengan pedoman dan juga disebabkan karena faktor-faktor subyektif para pelaksananya (*policy actors*) maupun dari masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung terkena dampak dari kebijakan yang dimaksud.

Hal tersebut terjadi juga dalam implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Medan Sunggal. Telah disebutkan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan peningkatan kualitas pendidikan adalah adanya perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep dan tujuan kebijakan, sehingga kebijakan dilaksanakan dengan cara-cara lain sesuai dengan persepsi masing-masing aktor kebijakan. Guna menghindari perbedaan persepsi dan pemahaman terhadap konsep dan tujuan antar aktor kebijakan atau antar implementers (unit birokrasi maupun non birokrasi), maka proses administrasi harus selalu berpijak pada standar prosedur operasional (SOP) sebagai acuan implementasinya.⁵³

Selain itu perlunya kepatuhan terhadap hukum dari pelaku kebijakan seperti apa yang dinyatakan Anderson, dapat meminimalkan hambatan dalam implementasi kebijakan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku menjadikan pelaksana kebijakan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, dan pelaksanaan kebijakan dapat memberi dampak positif terhadap target group. Faktor penghambat yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas pendidikan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan peran di antara pelaku kebijakan, sehingga implementasi dari kebijakan peningkatan kualitas pendidikan inipun

tidak seperti apa yang diharapkan pada awal dirumuskan dan dapat mengakibatkan kegagalan implementasi.⁵⁴

Beberapa faktor penyebab kegagalan pelaksanaan kebijakan, antara lain: Teori yang menjadi dasar kebijakan itu kurang tepat, karenanya harus dilakukan reformulasi terhadap kebijakan tersebut, sarana yang dipilih untuk pelaksanaannya tidak efektif, sarana mungkin tidak atau kurang dipergunakan sebagaimana mestinya, isi dari kebijakan itu bersifat samar-samar, ketidak pastian faktor intern dan atau faktor ekstern, kebijakan yang ditetapkan itu mengandung banyak kelemahan, dalam pelaksanaan kurang memperhatikan masalah teknis, adanya kekurangan akan tersedianya sumber-sumber pembantu (uang, waktu dan sumberdaya manusia).

Hambatan yang diidentifikasi dari hasil penelitian dan beberapa pendapat mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan kurang berhasilnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, maka dapatlah diketahui bahwa kurang berhasilnya implementasi kebijakan tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksana atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakannya yang kurang sempurna. Di sinilah peran penting yang dimainkan oleh pelaksana kebijakan dan harus mampu untuk mengambil langkah-langkah guna mengadakan *reformulation* sehingga kebijakan pokok itu dapat mencapai tujuannya.

Kegagalan implementasi peningkatan kualitas pendidikan terjadi karena sekedar mengadopsi model apa adanya tanpa persiapan dan upaya kreatif dari pelaku kebijakan, kepala Madrasah bekerja berdasarkan agendanya sendiri tanpa memperhatikan aspirasi seluruh warga madrasah, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak, menganggap peningkatan kualitas pendidikan adalah hal biasa, tanpa usaha serius akan berhasil dengan sendirinya. Untuk menghindari faktor penghambat yang mengakibatkan kegagalan implementasi sebagaimana tersebut di atas maka diperlukan suatu upaya yang melibatkan seluruh *stakeholders* guna mengadakan reformulasi kebijakan.

4. Upaya Mengatasi kendala Pelaksanaan KTSP di Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal.

Berbagai perubahan pada kurikulum, khususnya pada kurikulum KTSP, tentu madrasah mengalami hambatan ketika menerapkan kurikulum terbaru. Hambatan terjadi karena faktor internal dan eksternal, hambatan dari faktor internal yaitu kesulitan dalam proses penilaian dan pemanfaatan media pembelajaran yang terbatas. Selain itu, hambatan dari faktor eksternal yaitu sosialisasi mengenai kurikulum yang belum maksimal. Dengan adanya hambatan tentunya juga ada upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, upaya untuk mengatasi juga ada dari faktor internal dan eksternal. Upaya mengatasi dari faktor internal yaitu perlu diadakan forum MGMP dan peningkatan sarana prasarana. Selain itu, upaya mengatasi dari faktor eksternal yaitu sosialisasi mengenai kurikulum yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Guru Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap KTSP terutama terhadap tujuan tentang penyusunan KTSP, pengertian KTSP, prinsip-prinsip pengembangan KTSP, adanya acuan operasional penyusunan KTSP. Guru juga memiliki kemampuan sendiri seperti dalam penyusunan materi, silabus disusun sesuai dengan keadaan madrasah masing-masing.
- b. Guru Madrasah Aliyah Kecamatan Medan Sunggal memiliki kemampuan dalam pelaksanaan KTSP terutama dalam pelaksanaan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, mengidentifikasi materi pokok, mengembangkan pengalaman belajar, merumuskan indikator keberhasilan belajar, penentuan jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar.

- c. Evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan KTSP di Madrasah Aliyah Swasta Kecamatan Medan Sunggal untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KTSP sekaligus menemukan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan KTSP di MAS Medan Sunggal.
- d. Kendala pelaksanaan KTSP di Madrasah Aliyah Medan Sunggal dapat diketahui dari keterbatasan dana, waktu serta tenaga dan sebagainya. Dengan adanya hal ini, maka penggunaan metode pembelajaran selama ini belum bisa berlangsung secara efektif.
- e. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan KTSP dengan memberikan pelatihan kepada guru melengkapi sarana dan fasilitas yang dibutuhkan guru dalam memenuhi perangkat pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan KTSP

Saran-Saran

1. Kepada Kepala Madrasah lebih memperhatikan mekanisme penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan cara menjalankan tugas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kinerja elemen madrasah sehingga mampu meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah Aliyah Swasta Medan Sunggal.
2. Kepada guru-guru agar bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Cara yang dilakukan adalah guru mengikuti berbagai kegiatan dan pelatihan yang mendukung terhadap peningkatan kompetensi baik kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan kompetensi profesionalisme sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.
3. Kepada orang tua siswa/siswi harus diharapkan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Cara yang dilakukan adalah dengan berpartisipasi dalam memenuhi berbagai kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah termasuk dalam pendanaan dan penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

(Andnotes)

¹Hamzah B Uno, *Profesi Kependidikan Problema Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. II, h. 5.

²Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum KTSP* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 107.

³*Ibid.*, h. 113.

⁴Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik Cetak kedua belas* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 3.

⁵*Ibid.*, h. 165-166

⁶Wina Sanjaya, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 8.

⁷Musaheri, *Pengantar Pendidikan* (Yogyakarta : IRCI, 2007), h. 96.

⁸*Ibid.*, h.10

⁹*Ibid.*, h. 165-166

¹⁰*Ibid.*, h. 6

¹¹Halomoan, *Penyusunan Dokumen KTSP* (Medan : Media Persada, 2011) h. 1

¹²Usman Mulyadi, J. Mandalika, *Dasar-Dasar Kurikulum* (Surabaya : SIC, 2004), h. 2.

¹³Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi Pendidikan* (Jakarta:

Pustaka Al- Husna, 2000), h. 176.

¹⁴Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h. 91.

¹⁵Nanang Fatah, *Landasan Pengembangan Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h. 5.

¹⁶Badan Standar Nasional Pendidikan, *Penyusunan KTSP Kabupaten/Kota; Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2006), h. 5.

¹⁷E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 21.

¹⁸BNSP 2006, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah* (Jakarta : BNSP 2006), h. 31

¹⁹Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009), h. 263.

²⁰Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP))*(Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008),h. 9-10.

²¹E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; Sebuah Panduan Praktis*, h. 22.

²²Baedhowi, *Kebijakan Pengembangan Kurikulum*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional KTSP, UNNES, Semarang, 15 Maret 2007, h. 8.

²³Undang-undang RI No 4 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen & Peraturan Medikas No 11 Tahun 2005* (Bandung: Citra Umbara, 2006), h. 2-3.

²⁴Khiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 172.

²⁵Yunus Namsa, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2000),h. 87.

²⁶Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005), h. 138.

²⁷Syafruddin Nurdin, *Ilmu Pendekatan Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI* (Bandung: Cita Pustaka, 2005), h. 7.

²⁸Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), h. 21.

²⁹Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan* (Jakarta: Depag RI, 2007), h. 228.

³⁰*Ibid.*, h. 229-230.

³¹Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional, Edisi Kedua* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h. 7-8.

³²Rostiyah Nk, *Didaktik Metodik* (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h 32-33.

³³UU RI Nomor 14 Tahun 2005, h. 15.

³⁴Syafruddin Nurdin, *Ilmu Pendekatan Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI*,h. 127.

³⁵Dja'far Sady, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Citapustaka Media, 2006), h. 81.

³⁶*Ibid.*, h. 84

³⁷Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005), h. 12.

³⁸*Ibid.*, h. 217.

³⁹ Muslich Shabir, *Riyadhus Shalihin* (Semarang : Toha Putra, 1981), h. 281

⁴⁰Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005, h. 55-56.

- ⁴¹Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, h. 911.
- ⁴²E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Efektif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 37.
- ⁴³Bayu Sapta Hari, *Guru dan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Juni 2016, online : www.google.com
- ⁴⁴Elis Supartini, *Motivasi Kerja Guru dalam Mengembangkan Kurikulum di Sekolah*, Juni 2016, online : www.google.com
- ⁴⁵ Wina Sanjana, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2007, h. 34.
- ⁴⁶ Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2007, h. 9-10.
- ⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), cet. XIII, h. 12.
- ⁴⁸*Ibid.*, h. 224.
- ⁴⁹*Ibid.*, h. 244.
- ⁵⁰*Ibid.*, h. 246
- ⁵¹*Ibid.*, h. 270.
- ⁵²Nana Saodih, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*, Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004, h. 133.
- ⁵³Setyo Daarmodjo, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Cet. Pertama (Surabaya: Airlangga University Press. 2000), h. 189.
- ⁵⁴E. James Anderson, *Public Policy Making*, Cet. Pertama (New York: Holt Rinehart and Winston, 1979), h. 92-93.

Daftar Pustaka

- Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Diponegoro, 2005)
- Anderson, E. James, *Public Policy Making*, Cet. Pertama (New York: Holt Rinehart and Winston, 1979)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis* cet. XIII (Jakarta : Rineka Cipta, 2006)
- Badan Standar Nasional Pendidikan, *Penyusunan KTSP Kabupaten/Kota; Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah* (Jakarta : Departemen Pendidikan Nasional, 2006)
- BNSP 2006, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah* (Jakarta : BNSP, 2006)
- Baedhowi, *Kebijakan Pengembangan Kurikulum*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional KTSP UNNES, Semarang, 15 Maret 2007
- Daarmodjo, Setyo, *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah*, Cet. Pertama (Surabaya: Airlangga University Press. 2000)
- Dimiyati dan Mudjiono, *Belajar dan Pembelajaran* (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2009)
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Depag RI, *Kumpulan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan* (Jakarta: Depag RI, 2007)
- Fatah, Nanang, *Landasan Pengembangan Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006)

- Halomoan, *Penyusunan Dokumen KTSP* (Medan : Media Persada, 2011)
- Hamalik, Oemar, *Manajemen Pengembangan Kurikulum* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006)
- Hari, Bayu Sapta, *Guru dan Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Juni 2016, online : www.google.com
- Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum KTSP* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Langgulang, Hasan, *Manusia dan Pendidikan suatu Analisa Psikologi Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2000)
- Majid, Abdul, *Perencanaan Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Efektif dan Menyenangkan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)
- _____. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Sebuah Panduan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007)
- Mulyadi, Usman, J. Mandalika, *Dasar-Dasar Kurikulum* (Surabaya : SIC, 2004)
- Nk, Rostiyah, *Didaktik Metodik* (Jakarta : Bina Aksara, 1989)
- Namsa, Yunus, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2000)
- Nurdin, Syafruddin, *Ilmu Pendekatan Perspektif Baru Rekonstruksi Budaya Abad XXI* (Bandung : Cita Pustaka, 2005)
- Purwanto, Ngalm, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2005)
- Rosyadi, Khiron, *Pendidikan Profetik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001)
- Sanjaya, Wina, *Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta : Kencana, 2006)
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum : Teori dan Praktik* Cetakan kedua belas (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Sadly, Dja'far, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta : Citapustaka Media, 2006)
- Sanjana, Wina, *Strategi Pembelajaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Saodih, Nana, *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004)
- Supartini, Elis, *Motivasi Kerja Guru dalam Mengembangkan Kurikulum di Sekolah*, Juni 2016, online : www.google.com
- Sanjaya, Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran (Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP))* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008)
- Undang-undang RI No 4 Tahun 2005. *Tentang Guru dan Dosen & Peraturan Mediknas No 11 Tahun 2005* (Bandung: Citra Umbara, 2006)
- Usman, Moh. Uzer, *Menjadi Guru Profesional, Edisi Kedua* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006)
- Uno, Hamzah B, *Profesi Kependidikan Problema Solusi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia* , cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)